



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WALIDAD
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 453528

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 612 m²/40 m² di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 19.000.000

1. MOTOR, HONDA Metic Tahun 2011 KB 2000 FM, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, YAMAHA Metic Tahun 2013 KB 2000 FS, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, YAMAHA Metic Tahun 2011 KB 2000 FE, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 329.000.000

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 329.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2023/Khusus - Akhir Menjabat)****BIDANG : EKSEKUTIF****LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU****UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MEGAWATI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **453633**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 35.000.000**

1. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL
SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 14.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA YAMAHA 3CI (V-IXION) Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 31.800.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 51.860.502****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----****Sub Total** **Rp. 132.660.502****III. HUTANG** **Rp. ----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 132.660.502****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI RUSMINI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **453527**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 530.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 184 m2/40 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/300 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 17.000.000**

1. MOTOR, HONDA HONDA/NF125TR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
2. MOTOR, YAMAHA YAMAHA II B Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 166.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 21.899.026**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 734.899.026**

III. HUTANG **Rp. ----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 734.899.026**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.